

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA (SID) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA WARUNG BAMBU KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG

**Muhammad Hamdi Muntazir¹⁾, Toto Kushartono²⁾, Bayu
Septiansyah³⁾**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini berjudul: “Implementasi sistem informasi desa dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang timur”. Masalah penelitian ini adalah belum optimalnya pengimplementasian sistem informasi desa di Pemerintah Desa Warung Bambu yang ada di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan teori George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan informan sebanyak 6 informan. Teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa implementasi sistem informasi desa belum optimal dapat dilihat dari segi komunikasi yaitu kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat mengenai sistem informasi desa, disposisi yaitu kurangnya kesadaran digitalisasi pada pengelola sistem informasi desa dan masyarakat sekitar, sumber daya manusia yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan pengelolaan sistem informasi desa dan struktur birokrasi yaitu tidak adanya SOP khusus mengenai pengelolaan sistem informasi desa serta tidak adanya pertanggungjawaban khusus oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan sistem informasi desa. **Kata Kunci:** Impelementasi Kebijakan, Sistem Informasi Desa, Desa Warung Bambu, Keterbukaan Informasi Publik

Abstract

This research is entitled: "Implementation of the Village Information System in order to realize Public Information Disclosure in Warung Bambu Village, East Karawang District". The problem of this research is that the implementation of the village information system in the Warung Bambu Village Government in East Karawang District, Karawang Regency is not yet optimal. The theory used in this research is to use George Edward III's theory, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The research method used is descriptive method with a qualitative approach with 6 informants. Data collection techniques are literature study, observation and interviews. Based on the results of this study that the implementation of the village information system is not optimal, it can be seen in terms of communication, namely the lack of socialization from the Village Government to the community regarding the village information system, disposition, namely the lack of awareness of digitalization in the village information system manager and the surrounding community, human resources, namely the lack of quantity and quality of Human Resources (HR) in carrying out the management of the village information system and the bureaucratic structure, namely the absence of a special SOP regarding the management of the village information system and the absence of special accountability by the Village Government in the implementation of the village information system.

Keywords: *Policy Implementation, Village Information System, Warung Bambu Village, Public Information Disclosure*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, yang terus mengalami perkembangan yang diwujudkan dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa Indonesia memasuki era digitalisasi. Kemunculan teknologi informasi berbasis digital ini telah membawa dampak pada berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya. penggunaan internet ini sudah banyak diakses oleh seluruh penduduk Indonesia dan menjadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan Indonesia. Teknologi informasi dan komunikasi dalam keterbukaan informasi berbasis web ini bukan hanya untuk Pemerintahan di tingkat Daerah atau Kota saja, Berkaitan tentang keterbukaan informasi berbasis digital dengan sistem informasi desa dalam bentuk situs

web atau aplikasi, yang terkait dengan layanan publik berbasis digital. Desa saat ini memimpin jalan dan fokus pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa memainkan peran penting dalam pembangunan dan berhubungan erat dengan penduduk setempat, terutama dalam hal layanan publik. Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, menjadikan Desa tidak lagi sebagai objek pembangunan, akan tetapi menjadi subjek pembangunan. Desa juga mendapatkan hak dan kewajiban untuk mengatur sistem pemerintahannya sendiri. Dalam hal ini Sistem informasi desa merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah, sistem informasi desa menjadi prioritas dalam pembangunan desa yang dapat dilakukan dengan sumber daya potensial yang ada di desa sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan dasar pemerintahan desa. Dalam Sistem Informasi Desa (SID) terdapat pengelolaan data seperti informasi desa, informasi program desa, informasi kegiatan dan kinerja desa, informasi laporan keuangan, informasi layanan administrasi dan informasi lainnya. Selanjutnya, Pemerintahan Desa Warung bambu merilis program desa digital yaitu Sistem Informasi Desa (SID) berbasis web. Program ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Pasal 86 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan menyatakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintahan Desa dan dapat di akses oleh masyarakat Desa dan pembangunan Kawasan pedesaan. Dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di desa ini sebagai upaya pengembangan desa menjadi mandiri, yang memfasilitasi pengelolaan informasi ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan yang dimaksudkan untuk terselenggaranya keterbukaan informasi Pemerintahan Desa Warung Bambu, selanjutnya didasari dengan Peraturan Daerah Karawang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

Desa menyatakan di Pasal 167 bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. ada beberapa desa yang telah memasuki program digital dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pembangunan desa. Seperti halnya di Desa Warung Bambu yang menerapkan pelayanan serba *online*.

Gambar 1.1
Sistem Informasi Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang
Timur Kabupaten Karawang



(Sumber: <https://www.desawarungbambu.com/>)

Sistem informasi desa ini bisa menjadi solusi dari masalah informasi pemerintahan desa. Dengan adanya pengolahan data informasi secara online, maka kelemahan pengolahan informasi data secara konvensional dapat ditekan. Sistem informasi desa memberikan manfaat antara lain, hasil pengolahan data informasi secara statistik tersebut dapat digunakan dalam bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggara dan pelaksanaan pemerintahan desa dengan kualitas dan kuantitas para pelaksana kebijakan tersebut, serta kepentingan pembangunan perdesaan.

Sistem informasi desa menjadi prioritas dalam pembangunan desa yang dapat dilakukan dengan sumber daya potensial yang ada di desa sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan dasar pemerintahan desa. Dalam sistem informasi desa terdapat pengelolaan data seperti informasi desa, informasi program desa, informasi kegiatan dan kinerja desa, informasi laporan keuangan, informasi layanan administrasi dan informasi lainnya. Masyarakat dapat mengakses informasi dan pelayanan dalam beberapa cara melalui *Website* Desa, jaringan internet, kantor elektronik (*E-office*), dan media sosial.

Tabel 1.1

Data Statistik Pengunjung Website Sistem Informasi Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang

No	Tahun	Pengunjung Website	Jumlah Penduduk
1	2023	16.051	12.056
1	2022	13.673	11.192
2	2021	5.230	9.770

(Sumber Desa Warung Bambu Tahun 2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk desa warung bambu pada tahun 2023 yang berjumlah 12.056 memiliki sistem informasi desa yang sudah dikunjungi 16.051 kali. Angka ini meningkat melihat dari tahun 2022 yang hanya 13.673 pengunjung sistem informasi desa dan ini melebihi pada tahun 2020 angka pengunjung sistem informasi desa di Desa Warung Bambu 5.230 relatif rendah, meskipun pada angka pengunjung layanan *website* sistem informasi desa terbilang efektif akan tetapi sampai hari ini belum ada data yang menunjukkan pengunjung website tersebut adalah masyarakat desa warung bambu. Peneliti melihat berdasarkan hasil observasi awal bahwa kurangnya komunikasi/sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem informasi Pemerintah Desa Warung Bambu, kurangnya fasilitas yang ada seperti perangkat keras yang tidak memadai dan perangkat lunak yang tidak tersedia dengan akurat, kurangnya

sikap atau pengetahuan dari perangkat desa mengenai pengelolaan sistem informasi dan tidak adanya pendampingan secara khusus dari pihak ketiga untuk pengelolaan sistem informasi ini. Hal lainnya yaitu belum optimalnya sistem informasi desa karena kurangnya ketersediaan penyajian informasi yang lengkap, variatif dan informatif terkait informasi desa, informasi program desa, informasi kegiatan dan kinerja desa, informasi laporan keuangan, informasi layanan administrasi dan informasi lainnya. Hal tersebut menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi website sistem informasi desa tersebut. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena berbagai alasan, diantaranya adalah sebagai berikut: pemerintahan desa masih kesulitan dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) untuk keterbukaan informasi pada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu penelitian dilakukan pada Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang karena ingin tahu seberapa jauh Implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan yang telah diuraikan diatas, diharapkan keseluruhan pemerintahan desa dapat mengoptimalkan Sistem Informasi Desa (SID) dalam pelayanan masyarakat di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Maka peneliti mengambil judul penelitian: **“Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Rangka Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang”**.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan cara tertentu dalam menjelaskan dan meneliti permasalahan dengan menggambarkan serta menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta.

Penjelasan ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono, bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif telah menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013:9).

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan fakta di lapangan secara sistematis sehingga dapat memecahkan permasalahan berdasarkan data- data yang ada. Menurut Strauss dan Corbin bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi maka penelitian ini fokus terhadap kehidupan seseorang, Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan informan atau narasumber berdasarkan pada pedoman wawancara yang telah disediakan terlebih dahulu. Namun pada kenyataannya peneliti tidak memungkiri bahwa banyak informan atau narasumber yang digunakan dalam proses pengumpulan sampel sumber data. Peneliti berpendapat bahwa informan tersebut ada hubungannya dengan apa yang peneliti teliti. Pihak- pihak yang dijadikan informan berjumlah 6 orang, yaitu:

1. Kepala Desa Warung Bambu
2. Sekertaris Desa Warung Bambu
3. Kaur Perencanaan Desa Warung Bambu
4. Kaur Pelayanan Desa Warung Bambu
5. Tokoh Pemuda Desa Warung Bambu
6. Masyarakat Desa Warung Bambu

PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Karawang Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Desa dalam pasal 167 menerangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan pedesaan pemerintah desa diwajibkan untuk membuat sistem informasi desa dalam pemanfaatan sistem informasi berbasis web untuk meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat, dan meningkatkan infrastruktur penunjang sistem informasi dan pemahaman SDM aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan sistem informasi desa berbasis *website*. Sistem informasi desa bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi desa sebagai bentuk pembangunan daerah serta pengelolaan data daerah yang baik dimuat dari Pemerintahan Desa. Pembangunan suatu daerah dimulai dengan penyajian data yang efisien dan terintegrasi dengan baik.

Dimensi dan indikator yang digunakan peneliti untuk menjelaskan bagaimana implementasi sistem informasi desa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik desa warung bambu kecamatan karawang timur kabupaten karawang dengan menggunakan teori Edward III, sebagai berikut:

1. Komunikasi dengan indikator
 - a. Transmisi (penyaluran informasi)
 - b. Kejelasan Penyampaian Informasi
2. Sumber Daya dengan indikator
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Sumber Daya Non-Manusia (Fasilitas, saran dan prasarana, anggaran)
3. Sikap Pelaksana dengan indikator
 - a. Karakteristik Pelaksana (sikap pelaksana kebijakan)
 - b. Efek Disposisi (hambatan pelaksanaan program)
 - c. Insentif (upaya pelaksanaan program)
4. Struktur Birokrasi dengan indikator
 - a. SOP (mekanisme kerja)

b. Fragmentasi (penyebaran tanggung jawab)

1. (Transmisi (Penyaluran Komunikasi))

Penyampaian informasi oleh pelaksana kebijakan sangatlah penting untuk dilaksanakan. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, terutama komunikasi tentang pelaksanaan sistem informasi yang dibuat oleh Pemerintah Desa Warung Bambu Untuk Keterbukaan Informasi agar setiap masyarakat Desa Warung Bambu Sadar Akan Tentang informasi desa yang diberikan kepada masyarakat itu penting akan transparansi penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan kawasan pedesaan Warung Bambu yang lebih baik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dalam penyampaian informasi tentang sistem informasi desa oleh Pemerintah Desa Warung Bambu kepada Masyarakat Warung Bambu. Peneliti menemukan bahwa dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Warung Bambu masih belum efektif dan juga kurang sesuai apa yang ada di lapangan dengan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Warung Bambu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwasannya penyampaian informasi sistem informasi desa melalui diadakannya sosialisasi mengenai sistem informasi desa kepada masyarakat, Untuk meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi Pemerintah desa Warung Bambu kepada masyarakat Desa Warung Bambu. Pemerintah Desa juga bekerjasama dengan pemuda karang taruna untuk mensosialisasikan sistem informasi desa kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa digital warung bambu.

Penyampaian informasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yakni Pemerintah Desa Warung Bambu. Penyampaian informasi ini haruslah mudah

dimengerti serta dipahami agar pelaksanaan sistem informasi desa ini dapat berjalan dengan baik. Kepala Desa Warung Bambu menugaskan seluruh Aparatur desa Warung Bambu harus menjalankan Sistem Informasi Desa dan mensosialisasikan mengenai program Sistem Informasi Desa kepada masyarakat Desa Warung Bambu secara merata.

2. Kejelasan Penyaluran Informasi

Kejelasan penyampaian informasi oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan menunjukkan adanya kekurangan dalam komunikasi antara Kepala Desa Warung Bambu dan Aparatur Pemerintahannya terkait kejelasan penyampaian informasi tentang sistem informasi desa. Dalam observasi tersebut, terlihat bahwa informasi yang disampaikan Kepala Desa Warung Bambu belum efektif dan kurang sesuai dengan situasi yang ada di lapangan. Dalam konteks tersebut, kejelasan informasi terkait sistem informasi desa menjadi hal yang penting Kepala Desa Warung Bambu perlu berupaya untuk memberikan kejelasan informasi kepada Aparatur Desa Warung Bambu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hasil wawancara dengan informan Nomor 1, yaitu kepala desa warung bambu, menunjukkan bahwa sistem informasi desa merupakan program yang digagas oleh Pemerintah Desa yang pengelolaannya langsung oleh Aparatur desanya sendiri, Namun, terdapat beberapa perbedaan pengetahuan dan pemahaman antara kepala desa dengan aparatur desa warung bambu terkait Pengelolaan sistem informasi desa, sumber daya manusia dan fasilitas yang ada di Desa warung Bambu. Hasil wawancara dengan informan Nomor 2, yaitu Sekretaris Desa Warung Bambu, menunjukkan bahwa Sekretaris hanya bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dalam persiapan

data. Meskipun Sekretaris menjalankan tugas pokoknya dalam persiapan data, namun terdapat perbedaan pandangan antara Kepala Desa dan Sekretaris terkait keterlibatan dalam pengelolaan sistem informasi desa di Desa Warung Bambu terkait pelaksanaannya. Informan Nomor 3, yaitu Kepala Urusan Perencanaan Desa Warung bambu, menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan desa digital ini dan pengelolaan sistem informasi desa ini dalam pelaksanaannya hanya dilakukan oleh Kepala Urusan Perencanaan Desa. Aparatur desa yang lainnya tentu tidak terlalu terlibat langsung dalam perencanaannya dikarenakan kualitas pengetahuannya yang kurang terkait sistem informasi desa tersebut. . Informan Nomor 4, yaitu Kepala Seksi pelayanan Desa Warung bambu, menyatakan bahwa tugas dari Kasi Pelayanan hanya bertugas dalam menjalankan pelayanan saya dan tidak terlibat penuh perencanaan dalam pembangunan desa digital melalui sistem informasi desa. Menurut Peneliti untuk memperbaiki kejelasan penyampaian informasi, dapat dilakukan penyaluran informasi melalui pelatihan dan pendidikan. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah dengan menyelenggarakan kelas pelatihan perancangan sistem informasi desa yang membahas sistem informasi desa oleh Kepala Desa Warung Bambu, melibatkan pihak ketiga swasta, pemuda dan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesesuaian informasi antara semua pihak yang terlibat dalam implementasi sistem informasi desa di Desa Warung Bambu. Konsistensi Pemerintah Desa Warung Bambu Dalam Penjelasan Informasi atau penjelasan tentang kebijakan pelayanan Sistem Informasi Desa disampaikan secara konsisten oleh Pemerintah Desa Warung Bambu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau tertuang dalam kebijakan tersebut, baik menyangkut persyaratan administrasi untuk setiap jenis layanan, prosedur pelayanan, biaya administrasi pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, dan hal-hal lainnya. Kejelasan komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau

tidak ambigu/mendua. Kejelasan dalam sistem informasi desa berbasis website, kebijakan yang telah di sampaikan oleh kepala desa terhadap pemerintah desa, kepala dusun serta rt/rw yang akan ditransmisikan kepada pengguna website yang harusnya diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut.

3. Sumber Daya Manusia (Perangkat Pelaksana)

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan potensi yang harus dijadikan acuan pelaksana pembuat kebijakan agar dapat melaksanakan suatu program dengan baik, dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas serta mempuni menjadikan program yang sedang dijalankan dapat berkualitas pula. Berdasarkan hasil observasi peneliti terdapat permasalahan terkait kuantitas SDM dalam melaksanakan sistem informasi desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Warung Bambu (Informan Nomor 1). Pemerintah Desa ini menghadapi kekurangan SDM terutama di pengelolaan sistem informasi desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa digital. Dalam konteks ini, perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Warung Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Pemerintah harus Bekerja sama dengan stakeholder (penyedia layanan jasa) terkait sistem informasi desa ini melalui kelas pelatihan, pendidikan dan pengadaan tenaga kerja yang memadai dalam pengembangan SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pengadaan tenaga kerja yang memadai untuk mencapai tujuan pelaksanaan dengan lebih efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Warung Bambu (Informan Nomor 1), diketahui bahwa tidak terdapat bantuan dari Pemerintah Daerah Karawang untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana, sehingga Pemerintah Desa Warung Bambu juga berusaha meningkatkan kualitas sumber

daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang ada di Desa Warung Bambu mengenai sistem informasi desa. Wawancara dengan Sekretaris Desa Warung Bambu (Informan Nomor 2) mengungkapkan bahwa belum terjadi peningkatan sarana dan prasarana melihat terkendala oleh kurangnya SDM dalam pengelolaan sistem informasi desa. Wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan Desa Warung Bambu (Informan Nomor 3) Dengan adanya pembuatan sarana tower wifi ini untuk meningkatkan fasilitas yang ada untuk menunjang pelaksanaannya sistem informasi desa yang dimana masih banyak kekurangan terutama dari fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Desa Warung Bambu. Wawancara Kepala Seksi Pelayanan Desa Warung Bambu (Informan Nomor 4) mengungkapkan dengan berjalannya pelayanan sistem informasi desa membutuhkan fasilitas perangkat lunak yang baik.

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena tdiak adanya pelatihan mengenai sistem informasi yang merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai sistem informasi berbasis *website*. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang cukup baik secara kualitas maupun kuantitas. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi yang dimiliki dibidangnya. Adapun kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Aspek sumber daya

manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi karena tanpa sumber daya manusia yang handal maka implementasi kebijakan akan berjalan lambat dan tidak efektif. dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah adanya staff yang bertugas dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan suatu program.

Dalam pelaksanaan pelayanan melalui website ini yang bertugas adalah sekretaris desa dikarenakan belum ada staff khusus yang disediakan, Kepala Desa merupakan penanggung jawab seluruh kegiatan yang ada di Desa Warung Bambu, sedangkan operator merupakan staff yang bertugas untuk melayani masyarakat yang melakukan pengurusan melalui website desa, selanjutnya ada ketua RT dan ketua RW yang merupakan petugas validasi yang memiliki tugas seperti memberikan tanda tangan pada pengurusan surat menyurat manual.

4. Sumber Daya Manusia Non Manusia (Fasilitas, Sarana Prasarana, Anggaran)

Sumber daya non manusia meliputi dana yang memadai, ketersediaan sarana dan prasana. Menurut Edward III, sumber daya non manusia merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Selain sarana dan prasarana, pengelolaan dana yang benar juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan atau program dari dimensi sumber daya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang (Informan Nomor 1) "Pengelolaan anggaran dana untuk sistem informasi desa masih dilakukakan oleh Pemerintah Desa Warung Bambu sendiri, tidak ada anggaran khusus dari Pemerintah Daerah untuk sistem

informasi desa ini.” Wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan (Informan Nomor 3), menyatakan bahwa: “Sebetulnya anggaran pendanaan secara khusus untuk sistem informasi desa ini belum ada, ada dikarenakan masih terbenturnya dengan program-program yang lain yang ada di Desa Warung Bambu”

Sumber daya non manusia merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Hasil observasi peneliti dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang ada masih belum optimal, Setelah dilakukan penelitian, proses pengelolaan sistem informasi desa telah dilakukan namun masih berproses dan belum optimal, terdapat beberapa kendala dalam optimalisasi ini yaitu minimnya fasilitas di Pemerintah Desa termasuk komputer dengan spesifikasi tinggi yang belum memadai untuk pengelolaan sistem tersebut. pengelolaan dana juga menjadi perhatian dalam pengelolaan sistem informasi desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.

Berdasarkan hasil wawancara menurut Kepala Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang (Informan Nomor 1) Pengelolaan anggaran dana untuk sistem informasi desa masih dilakukakn oleh Pemerintah Desa Warung Bambu secara mandiri, tidak ada anggaran khusus dari Pemerintah Daerah untuk sistem informasi desa ini dalam peningkatan kualitas SDM dan peningkatan kualitas fasilitas sarana prasarana yang ada di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Wawancara dengan Sekretaris desa Warung Bambu (Informan Nomor 2) mengungkapkan: “Belum ada peningkatan dari sarana dan

prasarana karena terbentur dengan kurangnya SDM di Pemerintah Desa Warung Bambu”. dengan Kepala Urusan Perencanaan (Informan Nomor 3) menjelaskan bahwa Sebetulnya anggaran pendanaan secara khusus untuk sistem informasi desa ini tidak ada, ada dikarenakan masih terbenturnya dengan program-program yang lain yang ada di Desa Warung Bambu. Wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan (Informan Nomor 4) Semenjak berjalannya sistem informasi desa ini tentu membutuhkan kualitas SDM yang mumpuni dalam bidang *Software*. Wawancara dengan Ketua Karang Taruna Desa Warung Bambu (Informan Nomor 5) juga mengindikasikan Untuk sarana dan prasarana setelah adanya tower wifi yang disediakan untuk mengakses sistem informasi desa kami rasa sudah sangat bagus dibanding sebelumnya yang belum dibuat. Wawancara dengan salah satu masyarakat desa warung bambu (Informan Nomor 6) menunjukkan: “bahwa sarana dan prasarana yang ada di Desa Warung Bambu sudah cukup memenuhi kebutuhannya untuk mengakses sistem informasi desa sarana dan prasarana saat ini juga sudah cukup bagus hanya saja dari segi akses untuk masuk kedalam sistemnya masih terasa kurang seperti saat ini masih error dan tidak bisa diakses yang membuat poin kemudahan menjadi kurang”.

Dari hasil observasi dan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sarana, prasarana, dan pengelolaan dana merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan dan pengelolaan sistem informasi desa. Peningkatan sarana dan prasarana telah memberikan dampak positif, namun masih terdapat tantangan terkait peningkatan SDM dan Fasilitas. Selain itu, pengelolaan dana perlu diatur dengan baik untuk memastikan peningkatan fasilitas yang berkelanjutan. Secara parsial hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sarana prasarana berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Pemerintah Desa Warung Bambu. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa sarana prasarana searah dengan kinerja pegawai atau dengan kata

lain terpenuhinya sarana prasarana akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang baik/tinggi. Sarana dan Prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugastugas yang ditetapkan. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa sarana prasarana mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kinerja pegawai di Pemerintah Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang timur Kabupaten Karawang.

5. Karakteristik Pelaksana (Sikap Pelaksana)

Sikap pelaksana yang dimiliki pelaksana ini diperlukan dalam melaksanakan sistem informasi desa ini untuk melihat sikap seperti apa yang diberikan oleh para pelaksana di lapangan. Indikator ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana sikap pelaksana dalam implementasi Sistem Informasi Desa dalam Rangka Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Desa warung Bambu Kecamatan Karawang Timur yaitu melalui wawancara dengan beberapa informan.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui sikap pelaksana Pemerintah Desa Warung Bambu dalam melaksanakan sistem informasi desa meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana meskipun secara keseluruhan bahwa kurang meratanya sosialisasi mengenai sistem informasi desa kepada masyarakat. Sedangkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan mengungkapkan bahwa terdapat kurangnya sosialisasi mengenai sistem informasi desa oleh Pemerintah Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Hal ini dapat

dilihat dari kurang meratanya penyebaran informasi terkait sistem informasi desa tersebut yang dapat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia pengelola sistem informasi tersebut. Dalam konteks ini menurut peneliti, penting untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi sistem informasi desa kepada pengelola Aparatur Desa Warung Bambu. Pemerintah Desa perlu memperhatikan aspek meratakan penyebaran informasi agar seluruh pengelola pengelola sistem, informasi dapat memahami dan terlibat aktif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dilakukan oleh pelaksana seperti Pemerintah Desa Warung Bambu merupakan langkah yang positif. Namun, upaya tersebut harus disertai dengan sikap pelaksana yang lebih efektif dan sistematis guna memastikan bahwa tujuan sistem informasi desa dapat tercapai secara optimal di Desa Warung Bambu.

Disposisi memegang peranan penting saat Implementasi sistem Informasi Desa diterapkan di Pemerintah Desa Warung Bambu, hal ini menjadi bukti bahwa di level staf bahkan level publik dimensi disposisi atau sikap pelaksana yang berisikan kejujuran, motivasi, harapan, integritas dan penafsiran adalah hal yang sangat mendasar dan dibutuhkan. Sikap pelaksana ini merupakan dimensi yang dapat mengikat secara mental dan moral semua pemangku kepentingan, artinya semua lingkungan kebijakan dan pelaksana kebijakan merasa terikat, peduli dan bertanggungjawab.

6. Efek Disposisi (Hambatan Pelaksanaan)

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi keberlangsungan sistem informasi desa. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa hambatan yang dialami dalam menyelenggarakan sistem informasi

desa di Desa Warung Bambu yaitu sebagai berikut. 1) Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah desa terhadap pengelola sistem informasi desa, serta masyarakat sekitar mengenai sistem informasi desa ini 2) Kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan sistem informasi desa di Desa Warung Bambu. 3) Kurangnya fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak dalam melaksanakan sistem informasi desa. 4) Tidak semua perangkat di Desa Warung Desa Warung Bambu memahami tentang sistem informasi desa ini. 5) Kurangnya kesadaran pengetahuan teknologi dari masyarakat sekitar. 6) Tidak adanya SOP khusus mengenai sistem informasi desa. 7) Tidak adanya pertanggungjawaban khusus oleh Kepala Desa mengenai pelaksanaan sistem informasi desa yang ada di yang ada di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.

Menurut peneliti berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara Pemerintah Desa Warung Bambu dalam menyiapkan infrastruktur yang masih belum optimal, dan penghambatnya dari SDM masih memerlukan satu staff yang bisa membantu mengoperasikan website karena kekurangan staff ini juga mempengaruhi keberhasilan dari konsistensi dan juga menghambat berjalannya pelayanan serta penyebaran informasi. Demikian pula sebaliknya apabila sikap atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatanhambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan ini, dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja

untuk mencegah hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut.

7. Insentif (Upaya Pelaksana)

Sikap pelaksana harus dapat menarik perhatian kelompok sasaran kebijakan, dengan adanya insentif merupakan salah satu teknik yang ditawarkan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana dalam melaksanakan program tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa upaya Pemerintah Desa Warung Bambu dalam pengimplementasian sistem informasi desa yaitu upaya Upaya Pemerintah Desa dalam menjalankan sistem informasi desa yaitu dengan melakukan sosialisasi sistem informasi desa melalui kegiatan, dan penyebaran informasi melalui media sosial yang ada.

Pemerintah Desa Warung Bambu dalam penganggaran Desa Digital juga didalamnya tidak terdapat anggaran khusus kepada staff pendukung operasional desa digital seperti Teknisi desa digital dan Operator Desa Digital di Desa Warung Bambu. Insentifitas menjadi hal krusial dikarenakan penggerak desa digital merupakan kedua jenis staff ini, kedua posisi ini saling terkait dan bergantung satu sama lain untuk keberhasilan program Desa Digital. Teknisi bertanggung jawab memastikan infrastruktur TIK berjalan dengan baik, sementara operator bertanggung jawab memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital dengan mudah dan nyaman.

8. Mekanisme Kerja (SOP)

Mekanisme kerja berhubungan dengan tata kerja pelaksana kebijakan, berhubungan pula dengan Standart Opreational Procedure (SOP) yang dilaksanakan oleh birokrasi, baik untuk kegiatan kerja maupun dalam melaksanakan program. Indikator ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme kerja Pemerintah Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur

Kabupaten Karawang dalam mengimplementasikan sistem informasi desa dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dan hasil observasi peneliti dapat diketahui bahwa mekanisme kerja Pemerintah Desa Warung Bambu berdasarkan pada prosedur dan ketentuan yang ada yang dituangkan dalam Standart Opreational Procedure (SOP) yang dijadikan pedoman bagi pegawai baik dalam pelayanan dan pengelolaan, ketepatan kerja ataupun tugas lainnya yang harus dikerjakan.

Hanya saja untuk Standart Opreational Procedure (SOP) khusus mengenai sistem informasi desa di Desa Warung Bambu tidak ada SOP khusus yang dibuat oleh Pemerintah Desa itu sendiri, hal itu dikarenakan bahwa kurangnya kualitas SDM Pemerintah Desa Warung Bambu itu sendiri. Untuk mengelola Pelaksanaan sebuah kegiatan.

Struktur birokrasi menekankan perlu adanya Standart Operating Prosedur (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu instansi. Ia juga mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak instansi untuk mencapai tujuannya.

9. Fragmentasi (Penyebaran Tanggung Jawab)

Pentingnya melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya dan dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten. Indikator ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana penyebaran tanggung jawab (fragmentasi) dalam sistem informasi desa di Desa Warung Bambu. Hasil observasi peneliti dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan sistem informasi desa ini Pemerintah Desa melimpahkan sebagian wewenang kepada perangkat desa guna mempermudah terlaksananya sistem informasi desa ini. Implementasi nyata kelapangan lebih dominan dilaksanakan oleh perangkat desa, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah desa sebagai pelaksana penyelenggaraan dan pembangunan desa. Peranan Pemerintah Desa yaitu sebagai fasilitator yang menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah Desa membutuhkan bentuk kerjasama dengan pengelola layanan jasa informasi dalam penyelenggaraan dan menerima manfaat dalam menjalankan sistem informasi desa. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menurut peneliti, fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa aparatur desa yang berbeda sehingga memerlukan kordinasi. Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa fragmentasi/ penyebaran tanggung jawab terhadap sistem informasi desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang timur Kabupaten Karawang belum dilakukan ke beberapa aparatur desa yang berbeda yang mempunyai tugas dan tanggung jawab masing masing, sehingga membutuhkan kordinasi yang baik untuk mewujudkan fungsi sistem informasi desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, peneliti

menarik kesimpulan mengenai Implementasi Sistem Informasi Desa Dalam Rangka Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Warung bambu Kecamatan Karawang timur Kabupaten karawang terdapat bahwa kurang optimalnya pengimplementasian Sistem Informasi Desa Warung Bambu, dapat dilihat dari hambatan yang dialami yaitu kurangnya sosialisasi mengenai Sistem Informasi Desa Oleh Pemerintah Desa Warung Bambu serta adanya ketidak jelasan informasi Pemerintah Desa Warung Bambu Kepada Masyarakat Warung Bambu, tidak semua petugas memahami tentang Sistem Informasi Desa dengan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang ada membuat SDM yang ada kesulitan untuk memelihara sarana dan prasarana dalam Pengelolaan Sistem Informasi Desa tidak memiliki pertanggungjawaban khusus oleh Pemerintah Desa mengenai Sistem Informasi Desa salah satunya Salah Satunya Digitalisasi pelayanan Desa. ditinjau dari unsur: komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang meliputi, a) Komunikasi dalam implementasi sistem informasi Desa berbasis website di Desa Warung Bambu sudah berjalan meskipun masih perlu ditingkatkan dari transmisi; penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa masih kurang efektif, kejelasan; masih kurang karena masih ada beberapa layanan yang belum maksimal untuk diakses oleh masyarakat, Konsistensi; masih belum efektif dalam pembaruan data pada laman website. b) Sumberdaya implementasi sistem informasi desa di Desa Warung Bambu terdiri dari SDM; dioperasikan oleh Kaur Perencanaan Desa desa yang sudah mendapatkan pelatihan khusus terkait pengopersian website, Sarana dan prasarana; sudah memadai baik dari segi sarana ataupun prasarana yang digunakan, c) Disposisi terhadap implementasi sistem informasi publik berbasis website di Desa Warung Bambu sudah efektif karena kepala desa sangat mendukung adanya website ini, d) Struktur Birokrasi dalam implementasi sistem informasi publik berbasis website di Desa

Warung Bambu berdasarkan SOP Undang-undang Nomor 06 2014 Tentang Desa, Fragmentasi; sudah berjalan sesuai dengan penyebaran tanggung jawabnya masing-masing .

DAFTAR PUSTAKA

Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press

Prof. Dr. Sugiyono. (2010). prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r& d. intro (PDF Drive) (10th ed.). Penerbit Alfabeta Rauf Maulidiyah. (2015). pemerintahan desa (Yusni munaf, Ed.; 1st ed.). Nusa Media.

Pintar, B., Jahja, R., Herry, B., & Afandi, M. (2014). SISTEM ADMINISTRAS & INFORMASI DESA Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II.

Mustari. (2015). Pemahaman KEBIJAKAN PUBLIK. Yogyakarta (Cynthia, An). Leutikaprio

Hertati, D. (2020). MODEL IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DESA BERBASIS WEB BAGI PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SIDOARJO. 10, 1–9.

mukhsin. (2020). PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MENERAPKAN SISTEM INFORMASI DESA DALAM PUBLIKASI INFORMASI DESA DI ERA GLOBALISASI. 3.

Nain. (2017). Relasi pemerintah desa dan supradesa dalam perencanaan dan penganggaran desa.

Sulistyowati, D. (2013). PARTISIPASI WARGA TERHADAP SISTEM INFORMASI DEA. 586–587.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, 15

Januari 2014 (2014).

PERATURAN DAERAH KARAWANG NOMOR 14 TAHUN 2017

